



JURNALISME INVESTIGASI DAN PERAN JURNALIS MEMBONGKAR KORUPSI

**Diskusi “Penertiban dan
Optimalisasi Aset Negara melalui
Strategi Pencegahan dan
Penindakan”**

Nurdin Amir – Ketua AJI Makassar



TREN DAN DAMPAK KORUPSI DI INDONESIA

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA

1995 - 2020

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi alias IPK Indonesia 2020. Berdasarkan penelitian Transparency, Indonesia merosot ke IPK 37. Di Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Timor Leste (40 poin), Malaysia (51 Poin), Brunei Darusalam (60 Poin), dan Singapura (85 poin).



TEMPO.CO
Sumber: Tempo.co,
Transparency International
Indonesia Ilustrasi: Freepik
Desain: Moerat Sitompul

PANDEMI

Wawan mengatakan tahun ini Transparency mengambil tema kaitan pandemi Covid-19 dengan korupsi.

TURUN

- PRS International Country Risk Guide yang turun 8 poin menjadi 50
- IMD World Competitiveness Yearbook turun 5 poin
- Global Insight Country Risk Ratings turun 12 poin dari 47 menjadi 35
- PERC Asia Risk Guide turun 3 poin
- Varieties of Democracy Project turun 2 poin.

INDIKATOR MEROSOT

Manager Departemen Riset Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko mengatakan beberapa indikator yang membuat IPK Indonesia melorot

NAIK

■ World Justice Project atau Rule of Law Index, yaitu naik dua poin.

STAGNAN

■ World Economic Forum EOS 46 poin
■ Bertelsmann Foundation Transform Index 37 poin
■ Economist Intelligence Unit Country Ratings 37 poin.

Dampak Masif terhadap Sosial dan Kemiskinan



MAHALNYA HARGA JASA DAN PELAYANAN PUBLIK

Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnyanya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

PENGENTASAN KEMISKINAN BERJALAN LAMBAT

Lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.

TERBATASNYA AKSES BAGI MASYARAKAT MISKIN

Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan. Jasa pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dan sebagainya sulit diakses oleh Rakyat Miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Menciptakan lingkaran setan kemiskinan.

MENINGKATNYA ANGKA KRIMALINITAS

Menurut Transparency International, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan. Rasionalnya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat.

SOLIDARITAS SOSIAL SEMAKIN LANGKA

Masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ketidakjelasan masa depan serta hirpanitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan menjadi langka.

DEMORALISASI

Masyarakat menjadi semakin individualis. Mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan antar masyarakat sendiri.

Dampak Masif terhadap Ekonomi



PENURUNAN PRODUKTIVITAS

Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi, membuat produktifitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri untuk lebih baik terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik.



RENDAHNYA KUALITAS BARANG DAN JASA UNTUK PUBLIK

Jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan masyarakat, angkutan umu tidak layak, bangunan sekolah ambruk, adalah kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.



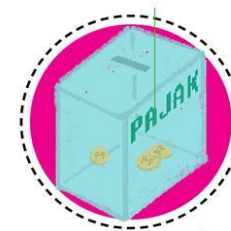
MENINGKATNYA HUTANG NEGARA

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai US\$201.07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun.



LESUNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.



MENURUNNYA PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK

APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.



Transparansi Internasional Indonesia (TI) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30 sampai 40 persen dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini memberikan dampak buruk yang masif terhadap masyarakat Indonesia di berbagai lini kehidupannya. Mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga terhadap lingkungan hidup.

Dampak Masif terhadap Korupsi Kerusakan Lingkungan

MENURUNNYA KUALITAS LINGKUNGAN

Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air dan udara, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun, dan sebagainya.

MENURUNNYA KUALITAS HIDUP

Kerusakan hutan hujan tropis akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yang terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia

Dampak Masif terhadap Korupsi Penegakan Hukum

FUNGSI PEMERINTAHAN MANDUL

Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

A

Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi



B

Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset



C

Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik



HILANGNYA KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP LEMBAGA NEGARA

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang.



lembaga Negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global (BKG) pada tahun 2009:



Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)



Partai Politik



Kepolisian RI



Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)

**KORUPSI
SEBAGAI
KEJAHATAN
LUAR BIASA
!!!**

PERAN JURNALIS

Dengan fungsinya sebagai kontrol sosial (watchdog), tugas pers adalah melawan tindak pidana korupsi



KAITAN JURNALISME INVESTIGASI DENGAN PEMBERANTASAN KORUPSI

- **Jurnalisme investigasi mampu membongkar/mengungkap skandal yang tersembunyi.**
- **Jurnalisme investigasi mampu mengoreksi atau memperkuat terjadinya dugaan korupsi yang sedang ditangani lembaga penegak hukum.**
- **Jurnalisme investigasi mampu membangun kesadaran publik.**
- **Jurnalisme investigasi mampu mencegah berlanjutnya praktik tindak pidana korupsi**

KISAH SUKSES JURNALISME INVESTIGASI

Investigasi skandal Watergate oleh dua jurnalis The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein yang membuat Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon mundur pada 8 Agustus 1974.

Investigasi akumulasi harta mantan presiden Joseph Estrada oleh PCIJ yang menyebabkan sang presiden terjungkal pada Januari 2001.

Investigasi selama 7 tahun yang dilakukan wartawan Inggris David Leigh dan Rob Evans terhadap suap yang dilakukan salah satu perusahaan senjata terbesar di dunia BAE System yang membuat BAE Systems akhirnya harus membayar denda.

Skandal Panama Papers dan Offshore Leaks yang mengungkap perusahaan bebas pajak di luar negeri yang terhubung dengan 140 politikus dan 14 pemimpin negara. Proyek ini dikerjakan oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ)

“Meski zaman telah memasuki era serba digital, pola kejahatan yang canggih hingga trik korupsi sistematis dan terorganisir akan selalu menjadi medan perjuangan baru bagi jurnalis”

Anya Schiffrin dalam *Global Muckraking, 100 years of investigative journalism from around the world (2014)*.



TANTANGAN JURNALISME INVESTIGASI

INTERNAL

- 1) Tidak ada dukungan dari perusahaan media.
- 2) Kepentingan bisnis dan politik pemilik media.
- 3) Kesejahteraan jurnalis rendah.
- 4) Redaksi dan jurnalis tidak independen.
- 5) Skill jurnalis kurang.

EKSTERNAL

- 1) Ancaman kekerasan pada jurnalis.
- 2) Ancaman oleh kelompok ke perusahaan media
- 3) Kriminalisasi dengan UU ITE
- 4) Persekusi online dan doxing
- 5) Serangan buzzer

SOLUSI

1. **Memastikan investigasi didukung dokumen, bukti dan data yang kuat.**
2. **Disiplin mematuhi KEJ.**
3. **Meningkatkan skill melalui pelatihan dan workshop.**
4. **Mengikuti program beasiswa.**
5. **Kolaborasi dengan NGO dan media lain.**



LANGKAH-LANGKAH JURNALISME INVESTIGASI

JURNALISME INVESTIGASI

- **Kepentingan Publik**
- **Mengungkapkan kejahatan atau yang ditutup-tutupi**
- **Menggali motif dan modus**
- **Mendudukan aktor dan perannya**

TAHAPAN

Mencari ide
Menggali petunjuk Awal
Menyusun angle dan hipotesa
Menyusun perencanaan

Observasi
Penjejakan dokumen
Wawancara narasumber

Penulisan
Evaluasi
Identifikasi risiko
Mitigasi

Publikasi

MENEMUKAN IDE

1. Whistleblower yang mengirimkan data ke media
2. Informasi dari korban/oposan
3. Menindaklanjuti pemberitaan harian
4. Audit BPK
5. Penyelidikan aparat penegak hukum

Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Kompas.com - 28/05/2018, 10:16 WIB



Komentar



Rapat paripurna pengumuman hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD DKI, Senin (28/5/2018). (KOMPAS.com/JESSI CARINA)

TERPOPULER

- 1** Anies Perintahkan Anak Buah Sisir Ulang Rancangan APBD 2020
Dibaca 50.890 kali
- 2** Lagi, Kecelakaan Truk Terjadi di Bekasi
Dibaca 21.126 kali
- 3** Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI: Kami Belum Lihat Kinerja Optimal TGUPP
Dibaca 20.335 kali
- 4** DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses
Dibaca 20.215 kali
- 5** Beragam Komentar Relawan Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Dibaca 17.959 kali



Investigasi ini terdenggan atas kerja sama Tempo, Change.org, dan Kita Bisa dalam program #Bongkar. Melalui Kita Bisa, ada 51 donatur yang menyumbang Rp 5.526.232 untuk program ini.



Nelayan Protes Penambangan Pasir Laut Royal Boskalis di Makassar

Reporter: **Fajar Pebrianto**

Editor: **Maria Rita Hasugian**

Sabtu, 25 Juli 2020 06:01 WIB



Royal Boskalis Westminster N.V

Jakarta - Sejumlah nelayan di Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan, menyampaikan protes akibat kegiatan **penambangan pasir laut** oleh Kapal Queen of The Netherlands, milik Royal Boskalis Westminster N.V. Penambangan ini adalah bagian dari Makassar New Port (MNP), proyek strategis nasional pemerintahan yang diresmikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 22 Mei 2015.

"Pengerukan pasir yang dilakukan Boskalis sekarang ini membuat nelayan merasa resah,



Hukum

JALUR KILAT TIM ANDALAN

Orang-orang dekat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga mendapat karpet merah untuk memperoleh izin usaha pertambangan pasir.



Hukum

IKAN HAMPA BAGAN TIADA

Kehidupan nelayan di

KPK Temukan Sejumlah Aset Sulsel Bermasalah

Makassar Rabu, 12 Desember 2018 11:29

0 Komentari



<https://fajar.co.id/2018/12/12/kpk-temukan-sejumlah-aset-sulsel-bermasalah/>

NEWS > SULSEL

Pemprov Sulsel Tertibkan Aset di Depan Nipah Mall

Lahan akan digunakan membangun Brigade Siaga Bencana



(Satpol PP lakukan penertiban aset Pemprov Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (13/11)/Satpol PP Sulsel

Verified
 Asrhawi Muin

f t p in

13 November 2019

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali melakukan penertiban aset. Penertiban dilakukan dengan melibatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibantu TNI-Polri, Rabu (13/11).

PENERTIBAN STADION MATTOANGING SEBAGAI ASET PEMPROV SULSEL



< Olahraga >

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan membuka paksa pintu gerbang Stadion Mattoanging saat akan melakukan penertiban aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/1/2020). Pemprov Sulsel terus berupaya untuk menertibkan sejumlah aset salah satunya adalah Stadion Mattoanging yang dikelola oleh Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS). ANTARA FOTO/Arnas Padda/YU/hp.

Pewarta: Arnas Padda | Editor: Hermanus Prihatna

Disiarkan: 15/1/2020 15:35 WIB

Dilihat: 516 kali

detikNews / Berita

KPK Bantu Tertibkan Aset Pemprov Sulsel Triliunan, Ini Rinciannya

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Senin, 21 Okt 2019 21:09 WIB



ILUSTRASI/Kantor Gubernur Sulsel/Foto: Noval Dhwinuari Antony-detikcom

Makassar - KPK berhasil mendorong Provinsi Sulsel melakukan penertiban aset senilai total Rp 6,5 triliun. Penertiban ini termasuk pengembalian aset Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar

Aset Pemprov Sulsel

Sudah Ditertibkan, Nilai Aset Stadion Mattoanging Rp 905 M, Barombong Rp 236 M

Selasa, 3 Maret 2020 17:27



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) perencanaan dan penganggaran daerah serta pengadaan barang dan jasa

MERUMUSKAN ANGLE DAN HIPOTESA

Home > Regional > Sulawesi

Ada Korupsi di Tambang Galian C di Kabupaten Maros

Eka Hakim
24 Agu 2019, 13:00 WIB



<https://www.liputan6.com/regional/read/4045008/ada-korupsi-di-tambang-galian-c-di-kabupaten-maros>

ANGLE : Sudut pandang, tujuan dari apa yang akan kita buktikan/jawab dalam liputan.

HIPOTESA : Dugaan sementara sesuai hasil investigasi awal

Contoh Angle:

Mengapa 10 tambang galian C di Kabupaten Maros tetap bisa beroperasi meski ilegal?

Contoh Hipotesa

10 tambang galian C di Maros bisa beroperasi karena diduga mereka menyogok pejabat dinas ESDM dan Polisi setempat

INTI DARI JURNALISME INVESTIGASI :

DOKUMENTASI

Mengapa :

Agar laporanmu kredibel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan!

PERENCANAAN

Ide :
Angle :
Hipotesa:

Dokumen
yang telah didapat :
yang masih dicari :

Narasumber
Primer :
Sekunder :

Foto :
Video :
Deadline:

HAL YANG DIDOKUMENTASI

Bukti visual

Bukti visual seperti foto/video, bukti transfer, rekam medis, nota pembelian.

Dokumen pemerintah/perusahaan

Peraturan, kebijakan, kontrak kerja

Data

Statistik jumlah penyakit, data ekspor-impor

Hasil sampel/tes

hasil uji laboratorium pencemaran

Wawancara

Saksi, korban, pelaku, ahli

MENCARI JEJAK DOKUMEN

Dari whistleblower

narasumber petunjuk yang ingin membantu jurnalis membongkar skandal/kejahatan

Dari sumber primer

Bisa dari korban, pelaku, kompetitor bisnis/politik yang nama mereka enggan dimunculkan.

Instansi pemerintah

Meminta langsung dari instansi pemegang dokumen

Perusahaan

Meminta langsung dari instansi pemegang dokumen

Data terbuka

Memanfaatkan open data yang tersedia di internet, seperti BPS, Dirjen Kemenkeu, AHU

Berkolaborasi dengan NGO

Bekerja sama dengan LSM yang terkait dengan isu tertentu.

Melalui Permintaan Informasi

Menggunakan jalur permintaan informasi sesuai UU KIP

JEJAK NARASUMBER

1. **Narasumber petunjuk.** Para pembocor yang biasanya di lingkaran dalam atau ada dalam barisan sakit hati yang jadi oposan.
2. **Narasumber primer.** Orang-orang yang jadi pelaku, korban, saksi. Biasanya ada di luar ring satu dari pelaku utama.
3. **Narasumber sekunder.** Informan yang mengetahui kasus tapi tidak memiliki data spesifik soal kasus tersebut.
4. **Narasumber ahli.** Orang-orang yang memiliki kemampuan teknis di bidang tertentu.

MELACAK PARA AKTOR

- 1) Dengan teknik penyamaran, melebur pada cerita.
- 2) Menempel pada subyek lain yang dekat dengan target.
- 3) Melacak dari internet, memanfaatkan media sosial



TERIMA KASIH